

PENDAMPINGAN PARTISIPATIF PENYUSUNAN RACANA TEPAT JOGJA DI KELURAHAN KARANGWARU KOTA YOGYAKARTA

**Bernardus Agus Rukiyanto¹, Hendra Kurniawan², Eko Hari Parmadi³,
Antonius Tri Priantoro⁴, Antonius Budisusila⁵, Catharina Brameswari⁶,
Diksita Galuh Nirwinastu⁷**

¹Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Sanata Dharma, Jalan Ahmad Jazuli Nomor 2 Kota Yogyakarta DI Yogyakarta

²Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata
Dharma, Mrican Catur Tunggal Depok Sleman DI Yogyakarta

³Program Studi Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Sanata Dharma, Paingan
Maguwoharjo Depok Sleman DI Yogyakarta

⁴Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata
Dharma, Paingan Maguwoharjo Depok Sleman DI Yogyakarta

⁵Program Studi Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma, Mrican Catur Tunggal
Depok Sleman DI Yogyakarta

^{6,7}Program Studi Sastra Inggris, Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma, Mrican Catur
Tunggal Depok Sleman DI Yogyakarta

²e-mail hendrak@usd.ac.id

Submitted 23-01-2025

Accepted 05-04-2026

Published 27-04-2026

Abstrak

Sejalan dengan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pembangunan berkelanjutan, Kelurahan Karangwaru memerlukan dokumen kebijakan lokal yang partisipatif sebagai penguatan identitas kampung dan arah pembangunan. Untuk itu, dilakukan pendampingan dalam menyusun dokumen Racana Tepat Jogja tentang arah pembangunan kampung berbasis potensi lokal dengan partisipasi warga. Metode yang digunakan bersifat partisipatif meliputi observasi, wawancara, dan *Focus Group Discussion (FGD)*. Analisis awal dilakukan pada dua kampung. Hasilnya, Kampung Blunyahrejo memiliki karakter ekonomi rumah tangga yang kuat, namun terkendala legalitas, *branding*, dan pemasaran. Kampung Bangirejo menonjol pada potensi *heritage*, kesenian lokal, serta minat wisata sejarah, namun minim pendanaan, inovasi, dan regenerasi. Pendampingan merekomendasikan *brand identity*, Blunyahrejo sebagai kampung wisata hijau dan Bangirejo sebagai kampung warisan budaya. Rancangan struktur Racana Tepat Jogja berhasil disusun sebagai pondasi perumusan strategi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, dan pariwisata kedua kampung secara berkelanjutan. Pendampingan terbukti meningkatkan kapasitas warga dalam membaca potensi kampung, merumuskan prioritas pembangunan, serta memperkuat sinergi berbagai pihak.

Kata Kunci: Racana Tepat Jogja, Kelurahan Karangwaru, potensi kampung, *brand identity* kampung

Abstract

In line with the Yogyakarta City Government's commitment to sustainable development, Karangwaru Village requires a participatory local policy document to strengthen village identity and development direction. Therefore, assistance was provided in developing the Racana Tepat Jogja document on the direction of village development based on local potential with community participation. The

participatory methods used included observation, interviews, and Focus Group Discussions (FGDs). Initial analysis was conducted in two villages. The results showed that Blunyahrejo Village has a strong household economic character, but is hampered by legality, branding, and marketing. Bangirejo Village stands out for its heritage potential, local arts, and historical tourism interest, but lacks funding, innovation, and regeneration. The assistance recommended brand identities, Blunyahrejo as a green tourism village and Bangirejo as a cultural heritage village. The Racana Tepat Jogja structural design was successfully compiled as a foundation for formulating strategies for sustainable social, economic, cultural, and tourism development for both villages. The assistance has been proven to increase the capacity of residents in understanding village potential, formulating development priorities, and strengthening synergy between various parties.

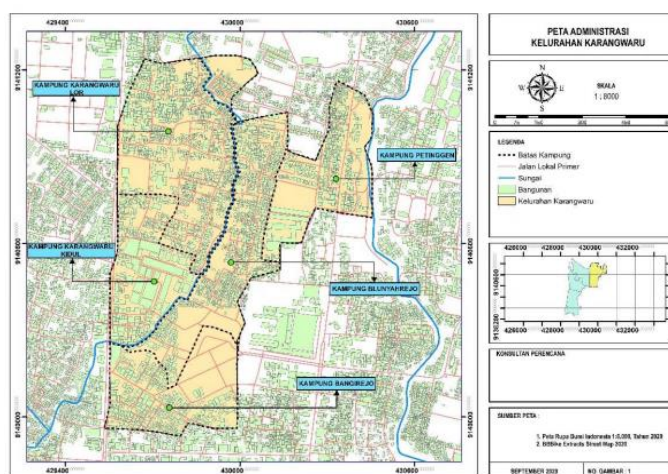
Keywords: *Racana Tepat Jogja, Karangwaru Village, village potential local, village brand identities*

PENDAHULUAN

Kebijakan Racana Tepat Jogja (RTJ) digagas oleh Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai dokumen perencanaan pembangunan kampung berbasis potensi lokal yang berfungsi sebagai peta jalan (*roadmap*) dengan melibatkan partisipasi warga dan sinergi pentahelix antara kampung-komunitas-kampus-korporasi-kota. Dalam konteks ini, kampung adalah perangkat pemerintahan setempat mulai dari pejabat kelurahan beserta jajarannya yang terkait, kepala kampung, ketua Rukun Warga (RW), hingga ketua Rukun Tetangga (RT). Komunitas adalah warga yang secara umum bersentuhan langsung dalam program ini adalah tokoh-tokoh kampung, termasuk kelompok pemuda. Kampus adalah perguruan tinggi yang menjadi mitra kelurahan, terutama di dalamnya yakni kelompok-kelompok pengabdian masyarakat. Korporasi adalah dunia usaha maupun industri yang bersedia bekerja sama dalam upaya pembangunan kampung. Kota dalam program ini adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.

Dalam kerangka tersebut, kampung-kampung pada berbagai kelurahan di wilayah Kota Yogyakarta memerlukan pendampingan dalam upaya penyusunan RTJ. Salah satunya, Kelurahan Karangwaru sebagai wilayah urban di Kota Yogyakarta dengan karakter sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan yang beragam. Kelurahan ini mencakup lima kampung, meliputi Blunyahrejo, Bangirejo, Karangwaru Lor, Karangwaru Kidul, dan Petinggen. Kelurahan Karangwaru juga memiliki keunikan spasial, yakni kepadatan kawasan.

Berdasarkan Peraturan Walikota (Perwali) Kota Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Yogyakarta Tahun 2021 – 2041, Karangwaru memiliki arah pengembangan menyesuaikan pola ruang kota yang mengutamakan fungsi permukiman terpadu dengan kemungkinan integrasi fungsi publik dan ekonomi yang mendukung kelancaran mobilitas dan kualitas hidup warga. Arah pengembangan kawasan tersebut, sebagaimana tampak dalam Gambar 1, telah memasuki kondisi kawasan padat yang hampir bersifat *completely full and saturated* (Pemerintah Kota Yogyakarta, 2021).



Gambar 1 Peta Administratif Kelurahan Karangwaru
Sumber: Tim Masterplan Kampung (2020)

Dari Gambar 1, tampak keberadaan bangunan (warna hijau) di wilayah Kelurahan Karangwaru tergolong padat. Hal ini menunjukkan kejenuhan kawasan yang merujuk pada kondisi suatu kawasan yang sudah sangat padat dan penuh fungsi. Kejenuhan kawasan memiliki dampak dan implikasi nyata pada aspek ekonomi, sosial meliputi kehidupan warga, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan, serta ketidاكلancaran mobilitas (Fernández-Aguilar et al., 2023; Loukaki, 2020; Ma et al., 2025; Sekarsari & Dwiatmoko, 2022). Situasi ini berpotensi meregresi arah pengembangan kawasan sebagai bagian dari perencanaan tata ruang yang mengatur pemanfaatan dan pengendalian ruang secara rinci di tingkat kelurahan sesuai dengan tujuan pengembangan kota secara keseluruhan. Kawasan yang kelebihan kapasitas cenderung mengalami tekanan-tekanan ekonomi, seperti harga properti, persaingan sumber daya,

ketidakmerataan ekonomi, dan akses hunian (Abhishek et al., 2025; Langemeyer et al., 2025). Implikasi ini mulai tampak pada kawasan Jalan Magelang dan Jalan Monginsidi yang didominasi perdagangan dan jasa yang tumbuh cepat disertai dengan keterbatasan usaha pada rumah-rumah di tengah permukiman.

Situasi di Kelurahan Karangwaru ini memerlukan upaya penemuan kembali potensi dan kekuatan baru berbasis pada usaha-usaha rumahan di tengah kendala dan keterbatasan keruangan (Pemerintah Kota Yogyakarta, 2021). Ruang permukiman yang padat diperkirakan sektor ekonomi warga lokalnya cenderung skala rumahan seperti industri kerajinan (kriya), warung makan, *laundry*, kos-kosan dan jasa penginapan, maupun jasa skala kecil lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir, Kampung Karangwaru menunjukkan dinamika pembangunan yang menarik, antara lain penguatan identitas kampung wisata, pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta revitalisasi kegiatan seni budaya. Meskipun demikian, tingkat keberhasilan pembangunan juga membutuhkan dokumen perencanaan partisipatif yang mengintegrasikan aspirasi warga, data objektif, potensi lokal, serta arah kebijakan pemerintah daerah.

Pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya bergantung pada aspek fisik, tetapi juga pembentukan karakter, keterampilan sosial, etika publik, dan kepemimpinan berintegritas (Peterson & Seligman, 2004). Perencanaan pembangunan partisipatif dianggap mampu meningkatkan keberlanjutan karena warga menjadi subjek aktif pembangunan (Annunziata et al., 2026). Teknik fasilitasi partisipatif seperti pemetaan partisipatif, *Focus Group Discussion* (FGD), simulasi, dan skoring dapat menjadi sarana untuk menggali aspirasi warga dan mengurangi potensi konflik (Djufry M., 2015; Patricia Leavy, 2017; Pike et al., 2025). Studi pada Desa Wisata Nglanggeran, misalnya, menunjukkan keberhasilan branding kampung memerlukan integrasi potensi alam, budaya, dan kreativitas warga (Kompas.com, 2022). Atas dasar inilah, metode partisipatori yang mengintegrasikan kajian sosial, ekonomi, spasial, dan budaya menjadi strategi kunci dalam program pendampingan ini yang mengedepankan *evidence-based policy* dan mendorong tumbuhnya demokrasi substansial.

Berdasarkan analisis situasi tersebut, muncul keyakinan bahwa upaya pembangunan di Kelurahan Karangwaru perlu memiliki fokus yang berbasis pada kebutuhan masing-masing kampung. Dalam konteks inilah, Kelurahan Karangwaru belum memiliki dokumen perencanaan kampung yang bersifat partisipatif dan komprehensif. Apalagi Kelurahan Karangwaru memiliki kompleksitas permasalahan sosial, lingkungan, dan ekonomi. Upaya pengembangan berbasis komunitas telah dilakukan melalui program *One Village One Sister University* yang dicanangkan Pemerintah Kota Yogyakarta. Akan tetapi, masih terdapat persoalan mendasar yakni kurangnya dokumen kebijakan lokal yang partisipatif sebagai panduan pembangunan berkelanjutan.

Penguatan identitas kampung sebagai titik pijak bagi arah pembangunan juga belum terstruktur. Daya dukung dan kolaborasi dengan pihak eksternal belum memiliki kerangka kerja yang tetap. Walaupun didapati program pada setiap kampung, pembangunan selama ini cenderung sektoral dan belum terintegrasi. Pembangunan sektoral selama ini sekedar diusahakan oleh beberapa RT atau RW tertentu, bahkan komunitas tertentu, khususnya para pemuda atau pegiat kampung. Alhasil, pembangunan bersifat insidental dan daya tahannya kurang. Pemerintah Kota Yogyakarta, melalui RTJ mengupayakan pembangunan terpadu yang berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan pendekatan baru yang mampu menggabungkan aspirasi warga, data lapangan, serta arah kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam satu dokumen rencana pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, program pendampingan ini dilakukan dengan tujuan utama yakni menyusun RTJ. Tahapan peraian tujuan ini dimulai dari menghasilkan peta potensi dan permasalahan kampung, rekomendasi branding kampung, dan rancangan struktur RTJ yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Pada akhirnya, program pendampingan ini menekankan terjadinya dialog warga, memastikan analisis potensi, dan penyusunan arah transformasi kampung secara inklusif. Selanjutnya, pada akhir pendampingan, kecakapan warga dalam membaca potensi kampungnya, merumuskan prioritas pembangunan, dan sinergitas antarpihak yang berperan diharapkan semakin menguat.

METODE

Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini menggunakan pendekatan partisipatoris yang menempatkan warga sebagai subjek utama. Pendekatan ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengumpulan data, analisis, dan pengambilan keputusan (Patricia Leavy, 2017). Pendekatan partisipatoris cenderung relevan dengan kebutuhan, menumbuhkan rasa memiliki (*ownership*), mendorong transparansi dan akuntabilitas, memunculkan inovasi lokal, dan mereduksi konflik sosial (Abhishek et al., 2025; Barsties et al., 2025; Brisdelli, 2026; Schindler, 2025). Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang kontekstual tentang potensi kampung mencakup sektor ekonomi, sosial, budaya, pariwisata, maupun ekologi.

Kegiatan pendampingan dilaksanakan selama periode Agustus–November 2025, berlokasi di Kelurahan Karangwaru, Kota Yogyakarta dengan fokus awal pada dua kampung yakni Blunyahrejo dan Bangirejo. Tahap pertama, kegiatan observasi partisipatif untuk mengidentifikasi institusi sosial-budaya dan visualisasi potensi maupun kekhasan kampung. Kegiatan dilaksanakan di balai RW, aula Kelurahan Karangwaru, dan kunjungan ke beberapa titik lokasi yang terkait dengan aktivitas masyarakat. Setiap pelaksanaan observasi didampingi oleh 2-3 tokoh masyarakat maupun perangkat kampung atau kelurahan.

Tahap kedua, wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat, pelaku UMKM, penggerak seni budaya, dan perangkat kelurahan untuk menggali pengalaman dan narasi kehidupan warga dan permasalahannya. Kegiatan ini dilakukan dengan berkunjung ke rumah tokoh masyarakat maupun mengundang para narasumber ke kampus tempat peneliti berkarya. Setidaknya 5-8 tokoh masyarakat diajak berbincang sebagai bentuk wawancara dan diskusi.

Tahap ketiga, *Focus Group Discussion* (FGD) berbasis kampung untuk mendiskusikan temuan lapangan guna merumuskan potensi, masalah, titik ungkitan, dan arah pengembangan kampung. Peserta FGD meliputi kaum perempuan pelaku UMKM, pemuda, penggerak seni, kepala kampung, dan ketua RW serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), dan perangkat Kelurahan Karangwaru dengan rata-rata

kehadiran sekitar 2-15 orang setiap diskusi. Dari tiga tahapan kegiatan ini, dirumuskan potensi dan masalah kampung yang bersumber dari partisipasi warga.

Tahap terakhir yakni penyusunan rekomendasi *branding* kampung dan rancangan struktur RTJ yang dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai hasil jangka panjang dari kegiatan pendampingan ini. Tingkat keterlibatan warga dalam program pendampingan ini diukur dari kesediaan mereka menjadi narasumber dalam wawancara dan kontribusi aktif mereka dalam FGD. Kelurahan Karangwaru sebagai subjek pengabdian menyediakan fasilitas ruang pertemuan dan data administratif kampung. Tim pengabdian menyediakan tenaga ahli, mahasiswa pendamping, instrumen dokumentasi, dan analisis data. Komunitas lokal menyediakan informasi kontekstual dan jaringan sosial internal kampung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Racana dalam Bahasa Jawa berarti rencana atau rancangan sebagai dasar atau landasan. Racana Tepat Jogja (RTJ) dapat dimaknai sebagai pondasi untuk meletakkan bangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan perkotaan sehingga dapat berdiri tegak meskipun menghadapi tekanan-tekanan persoalan. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, proses regenerasi kepemimpinan lokal juga dibutuhkan untuk menjadi agen perubahan yang menggerakkan, memberdayakan, dan mampu mengomunikasikan masyarakat kampung maupun lintas kampung (Bappeda Kota Yogyakarta, 2025). Pembangunan bukan soal bangunan fisik semata, tetapi memerlukan konstruksi naratif, makna dan *sosial virtue*.

Kampung Blunyahrejo dan Bangirejo menjadi fokus awal dalam pengabdian kepada masyarakat ini. Pertimbangannya, kedua kampung ini memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Kampung Blunyahrejo terdiri dari 3 RW dengan 17 RT dan Kampung Bangirejo dibagi menjadi 3 RW dengan 12 RT. Kedua kampung ini juga memiliki potensi yang relatif menonjol. Apalagi, keduanya juga bersinggungan dengan jalan utama yakni Jalan Magelang dan Jalan Monginsidi yang merupakan kawasan ekonomi bertumbuh. Pemilihan kedua kampung ini tidak berarti meminggirkan ketiga kampung lainnya, namun bermaksud untuk memberi fokus pendampingan yang lebih matang.

Peta Potensi dan Permasalahan Kampung

Kampung Blunyahrejo saat ini menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif berbasis pertanian perkotaan dan agrowisata. Melalui pengembangan Kebun Markisa seperti pada Gambar 2, kampung ini tidak hanya menghasilkan produk pertanian, tetapi juga menarik wisatawan untuk belajar sekaligus menikmati hasil olahan. Kehadiran agrowisata ini terbukti meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperluas lapangan kerja. Selain itu, kegiatan seni seperti pentas menyanyi yang rutin digelar menjadi daya tarik budaya sekaligus sarana memperkuat interaksi sosial. Kehidupan ekonomi warga juga semakin dinamis dengan hadirnya UMKM lokal yang terorganisasi dalam *foodcourt*, menyediakan kuliner khas dan membuka peluang usaha baru. Kombinasi pertanian, wisata seni (setiap Senin, Rabu dan Sabtu malam), dan UMKM menjadikan Blunyahrejo keluar dari jerat kemiskinan serta tumbuh sebagai kampung mandiri dan berkelanjutan.



Gambar 2 Kebun Markisa di Kampung Blunyahrejo

Kebun Markisa pada Gambar 2 menjadi ruang bersama warga, gotong royong, dan menciptakan lingkungan yang produktif. Kampung Blunyahrejo juga memiliki tradisi budaya yang masih dijaga melalui penyelenggaraan rutin Gumregah Blunyahrejo, sebuah festival lokal yang menampilkan berbagai kesenian tradisional. Salah satu yang paling menonjol adalah pertunjukan jathilan, kesenian khas Jawa yang menggabungkan musik, tari, dan nuansa magis. Dalam aspek infrastruktur dan lingkungan, Blunyahrejo pada awalnya dikenal sebagai kawasan kumuh yang terisolasi, terutama karena letaknya di tepi Sungai Buntung

yang dipenuhi semak liar dan sampah. Situasi mulai berubah ketika Blunyahrejo mendapatkan Program PLPBK (Perencanaan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas) serta Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh). Kawasan Blunyahrejo ditata ulang sehingga wajah kampung menjadi lebih layak huni dan tertata rapi.

Kebun markisa menjadi potensi berharga, namun juga menyimpan masalah. Produksi markisa semakin sedikit sehingga kebun markisa lambat laun menjadi tempat berkumpul warga saja. Aktivitas ekonomi, UMKM, dan kuliner hanya ramai pada waktu tertentu. Kondisi ini memerlukan diversifikasi produk kuliner, termasuk olahan markisa, sebagai daya tarik. Keberadaan *foodcourt* juga harus mampu bersaing dengan kuliner lainnya. Permasalahan lain yakni keterbatasan kapasitas, biaya operasional, dan edukasi masyarakat dalam pengelolaan program maupun perawatan fasilitas. Lahan untuk pengembangan UMKM juga terbatas, termasuk pula kecakapan akses teknologi yang belum merata membuat jangkauan pasar UMKM belum maksimal. Keterbatasan promosi, fasilitas yang tidak memadai, dan tata kelola yang belum efektif membuat pengembangan kebun markisa sebagai destinasi wisata terhambat.

Kampung Bangirejo dikenal sebagai Kampung Kesenian. Salah satu yang menonjol adalah musik keroncong yang masih dilestarikan sebagai identitas lokal. Selain itu, seni mural juga berkembang pesat, menjadikan dinding-dinding kampung sebagai media ekspresi kreatif sekaligus mempercantik lingkungan. Keberadaan Kelompok Seni Sanggar Mustikaning Pertiwi semakin memperkuat posisi Bangirejo sebagai pusat kegiatan seni, dengan beragam aktivitas yang tidak hanya menjaga tradisi tetapi juga membuka ruang kolaborasi bagi generasi muda untuk terus berinovasi. Hal ini menunjukkan bahwa Bangirejo tidak hanya menjadi kawasan padat penduduk, tetapi juga ruang hidup yang kaya akan kreativitas dan nilai budaya, menjadikannya relevan sebagai contoh kampung yang mampu memadukan tradisi dengan perkembangan seni kontemporer.

Selain Taman Bangirejo sebagai ruang terbuka hijau, Kampung Bangirejo memiliki fasilitas Sistem Pengelolaan Air Hujan (SPA). Potensi ini membuat lingkungan Bangirejo menjadi kawasan urban yang tergolong rapi dan layak huni. Potensi tersembunyi yang unik dan tidak kalah menarik juga dimiliki oleh

Bangirejo. Sebagaimana dalam Gambar 3, kampung ini memiliki warisan arsitektur kolonial berupa rumah-rumah kuno. Keberadaannya tidak hanya memperkaya nilai estetika kawasan, tetapi juga bisa dikembangkan sebagai destinasi edukasi sejarah, *homestay* bernuansa *heritage*, atau ruang kreatif yang menarik wisatawan. Apalagi tren pariwisata saat ini menekankan pengalaman otentik dan pelestarian warisan budaya, sehingga Bangirejo dapat memperkuat citra sebagai kampung dengan nilai historis sekaligus ekonomi kreatif.



Gambar 3 Salah Satu Potensi Heritage di Kampung Bangirejo

Dengan *branding* Kampung Kesenian, Bangirejo tengah menghadapi kelesuan dalam berkesenian tradisional. Tantangan yang dihadapi yakni minimnya regenerasi seniman muda, terbatasnya pelatih kompeten, pandangan masyarakat yang menganggapnya kuno, serta kurangnya dana untuk alat musik dan kostum. Pemeliharaan Taman Bangirejo juga membutuhkan sumber dana yang memadai. Saat ini banyak fasilitas rusak dan kurangnya tempat sampah yang memadai, ditambah masih rendahnya kesadaran pengunjung dalam menjaga kebersihan. Keberadaan warisan arsitektur tradisional yang menjadi potensi khas Bangirejo juga tidak mudah untuk dirawat dan dikelola. Pelestarian bangunan heritage ini menghadapi kendala mahalnya biaya renovasi dan pemeliharaan serta rendahnya pemahaman masyarakat dalam mengelolanya sebagai wisata sejarah.

Potensi yang juga menyimpan permasalahan pada kedua kampung ini sangat menarik. Situasi tidak terelakkan yakni kejenuhan kawasan terbukti memiliki dampak dan implikasi nyata pada berbagai aspek khususnya sosial, ekonomi,

lingkungan, dan mobilitas (Fernández-Aguilar et al., 2023; Loukaki, 2020; Ma et al., 2025; Sekarsari & Dwiatmoko, 2022). Blunyahrejo mengalami kesulitan dalam mengembangkan UMKM karena lahan yang terbatas. Bahkan sebelumnya, kampung ini termasuk kawasan yang terisolir dengan akses yang tidak mudah. Demikian pula di Bangirejo, untuk menghadirkan wisata sejarah harus didukung keberadaan ruang terbuka dan fasilitas yang memadai, namun keterbatasan ruang akibat kepadatan permukiman menjadi tantangan yang sama. Permasalahan ini berujung pada sulitnya menyelesaikan persoalan akibat tekanan-tekanan ekonomi (Abhishek et al., 2025; Langemeyer et al., 2025).

Pembangunan berkelanjutan tidak hanya bergantung pada aspek fisik, tetapi juga pembentukan karakter, keterampilan sosial, etika publik, dan kepemimpinan berintegritas (Peterson & Seligman, 2004). Pengembangan ekonomi digital di Blunyahrejo menghadapi tantangan masih rendahnya kecakapan akses teknologi warga. Demikian pula di Bangirejo, untuk menghadirkan program wisata sejarah membutuhkan keterampilan warga dalam mengelola aktivitas pariwisata sejarah. Untuk itu, perencanaan pembangunan yang partisipatif tepat bila dianggap mampu meningkatkan keberlanjutan karena warga menjadi subjek aktif pembangunan (Annunziata et al., 2026).

Rekomendasi *Brand Identity* Kampung

Selama ini, pengembangan kampung tematik telah menjadi fokus berbagai studi, terutama dalam konteks pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal. Pemberdayaan masyarakat melalui teknik fasilitasi partisipatif terbukti menjadi sarana untuk menggali aspirasi warga yang mampu mengurangi potensi konflik (Djufry M., 2015; Patricia Leavy, 2017; Pike et al., 2025). Pendekatan ini juga cocok diterapkan pada Kelurahan Karangwaru. Dalam konteks perkotaan padat, tantangan gentrifikasi, kesenjangan ekonomi, dan kesepian warga mengharuskan adanya pendekatan yang bersifat interdisipliner. Konsep *The Sublime Village Livelihood* menjadi relevan dalam merancang strategi pengembangan yang secara lintas disiplin memadukan harmoni sosial-lingkungan, kemandirian ekonomi berbasis lokalitas, estetika ruang, dan inovasi budaya (Amariglio et al., 2021). Aspek kehidupan kampung tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga

menghadirkan makna, keindahan, dan harmoni dalam hidup warganya melalui *rebranding*. *Branding* kampung memerlukan integrasi potensi alam, budaya, dan kreativitas warga (Kompas.com, 2022). *Rebranding* bukan sekedar mengganti nama atau logo, tetapi mengarahkan seluruh aktivitas pada identitas baru.



Gambar 4 Kegiatan FGD untuk Pemantapan Data

Melalui FGD sebagaimana ditunjukkan Gambar 4, *rebranding* Kampung Blunyahrejo dirumuskan dalam identitas baru “Blunyahrejo, Kampung Wisata Hijau”. *Branding* ini mengacu pada keberadaan kebun markisa dan menegaskan keterhubungan fisik dengan *Karangwaru Riverside* sebagai koridor hijau di tepi sungai. Agrowisata markisa bukan sekedar komoditas, namun juga pintu masuk edukasi lingkungan dan memberi nilai tambah sebagaimana markisa dapat dimaknai sebagai “mari kita bersatu, mari kita bersama, mari kita bisa”. Blunyahrejo juga dapat mengangkat potensi budaya jathilan dan musik sebagai media edukasi hijau. Dengan demikian, melalui gagasan ekonomi hijau dalam pengembangan UMKM, perekonomian keluarga turut bangkit.

Rekomendasi diajukan untuk *rebranding* Kampung Bangirejo yakni “Bangirejo, Kampung Warisan Budaya”. *Branding* ini menampilkan kekhasan warisan rumah-rumah lawas. Melalui program wisata edukasi sejarah, selain pemanfaatan heritage, potensi seni dan ruang terbuka hijau sebagai titik kumpul juga dapat diakomodasi. Kelemahannya, sebagai *branding* baru membutuhkan usaha dari awal yang tidak mudah, perizinan, pendanaan, dan penyuluhan maupun pelatihan terkait dengan wisata edukasi sejarah. Dalam konteks edukasi sejarah, di

Bangirejo juga terdapat Polirejo (Pojok Literasi Kemantren Tegalrejo) yang dapat dikembangkan sebagai bagian dari *branding* baru ini.

Rancangan Struktur Racana Tepat Jogja

Rancangan struktur RTJ yang disusun secara partisipatif ini difokuskan pada dua kampung. Blunyahrejo, Kampung Wisata Hijau, mengusung program pengembangan (1) revitalisasi agrowisata kebun markisa, (2) pengembangan UMKM kuliner hijau, (3) revitalisasi seni-budaya berwawasan lingkungan, (4) penguatan rekreasi keluarga *riverside-playground*, (5) penguatan infrastruktur lingkungan dan manajemen risiko iklim, serta (6) penguatan kelembagaan dan modal sosial untuk ekonomi hijau. Rancangan ini disusun dengan menekankan aspek ekologi dan perkembangan ekonomi (Abhishek et al., 2025; Amariglio et al., 2021; Langemeyer et al., 2025). Untuk Bangirejo, Kampung Warisan Budaya, merancang (1) promosi branding baru dalam bentuk edukasi sejarah melalui kerja sama dengan Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, dan (2) *Historical Walking Tour* Kampung Bangirejo sebagai destinasi utama bagi siswa sekolah dasar hingga menengah, wisatawan domestik, maupun wisatawan mancanegara. Dengan demikian, Kampung Bangirejo mendukung pembangunan karakter generasi muda dan kepemimpinan berkelanjutan (Peterson & Seligman, 2004).

Strategi pengembangan Kampung Wisata Hijau di Blunyahrejo dalam dokumen racana disepakati memperhatikan potensi yang sudah ada. Revitalisasi pengembangan agrowisata kebun markisa dilakukan melalui praktik pertanian ramah lingkungan, pengembangan paket agrowisata edukatif, diversifikasi produk olahan markisa, dan menjadikannya laboratorium ekonomi hijau. Pengembangan UMKM kuliner hijau diupayakan melalui transisi menu berbasis bahan segar lokal, pelatihan *green business* bagi para pelaku UMKM kuliner, *branding* kuliner hijau, dan mengintegrasikan UMKM kuliner dengan paket wisata.

Revitalisasi seni-budaya berwawasan lingkungan memanfaatkan program *Gumregah* dan *Jathilan* untuk memasukkan pesan-pesan ekologis. Penguatan rekreasi keluarga *riverside-playground* diupayakan dengan penataan *playground*, perbaikan elemen ruang publik, dan penerapan prinsip *zero waste event*. Penguatan infrastruktur lingkungan dan manajemen risiko alam dilakukan dengan

optimalisasi IPAL komunal, pengelolaan sampah terpadu, mitigasi risiko iklim dan banjir, dan penguatan kolaborasi antarpihak. Untuk penguatan kelembagaan dan modal sosial untuk ekonomi hijau dilakukan penguatan pokdarwis, gapoktan, komunitas seni, pengelola *foodcourt*, dan struktur RT/RW, penyusunan aturan kampung, serta pelatihan manajemen keuangan.



Gambar 5 Kegiatan FGD untuk Rekomendasi Rancangan RTJ

Masih dalam FGD, sebagaimana Gambar 5, pengembangan Kampung Warisan Budaya di Bangirejo dimulai dari identifikasi bangunan (rumah, sekolah, dan lainnya) yang merupakan peninggalan bergaya kolonial. Selanjutnya dilakukan konstruksi narasi sejarah bangunan-bangunan peninggalan bergaya kolonial Belanda di Bangirejo dengan membangun benang merah satu dengan lainnya. Bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, Kampung Bangirejo disulap menjadi destinasi *historical walking tour* bagi siswa sekolah, wisatawan domestik, maupun mancanegara. Strateginya dengan memanfaatkan potensi cagar budaya bangunan bergaya kolonial, kesenian jathilan, keroncong, atau lainnya, hingga pemberdayaan UMKM.

Dalam jangka panjang, Kampung Bangirejo dapat menjadi laboratorium edukasi pariwisata kesejarahan melalui kerja sama dengan kampus. Tahapannya dimulai dengan (1) mengidentifikasi kebutuhan, potensi, dan penataan titik-titik kunci yang menjadi jalur *historical walking tour*, (2) merancang desain *historical walking tour* berkolaborasi dengan kesenian jathilan, keroncong, hingga UMKM,

(3) menyiapkan para pemandu wisata sejarah melalui pendidikan dan pelatihan, terutama dari kalangan muda, (4) melakukan promosi digital melalui beragam media sosial, (5) menjalin kerja sama dengan sekolah-sekolah di Bangirejo dan sekitarnya agar siswanya mengikuti *historical walking tour* sebagai sarana belajar sejarah lokal, dan (6) penguatan komunitas kesenian dan UMKM atau ekonomi kreatif dengan memanfaatkan keberadaan bangunan-bangunan cagar budaya. Hal ini juga memungkinkan dengan rancangan program tersendiri di kemudian hari.

SIMPULAN

Pendampingan partisipatif di Kelurahan Karangwaru, Kota Yogyakarta bermuara pada dihasilkannya RTJ. Fokus awal pendampingan dilakukan pada dua kampung. Kampung Blunyahrejo memiliki karakter ekonomi rumah tangga yang kuat dan didominasi UMKM yakni usaha kuliner yang dikelola kaum perempuan. Kampung Blunyahrejo memiliki potensi taman markisa yang membutuhkan pengembangan. Kendala yang dihadapi Blunyahrejo di antaranya tentang legalitas, *branding*, dan pemasaran digital. Kampung Bangirejo menonjol pada potensi *heritage*, kesenian lokal jathilan dan keroncong, serta minat wisata sejarah. Keberadaan rumah-rumah lawas bergaya kolonial dapat menjadi potensi yang dapat dikembangkan. Bangirejo menghadapi kendala minimnya pendanaan, inovasi program, dan regenerasi seniman. Pendampingan menghasilkan rekomendasi *brand identity* kampung yakni Blunyahrejo sebagai kampung wisata hijau dan Bangirejo sebagai kampung warisan budaya. Strategi pengembangannya dirancang dalam struktur RTJ sebagai pondasi strategi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, dan pariwisata di Kelurahan Karangwaru secara berkelanjutan. Antusiasme warga menunjukkan pendampingan ini mampu meningkatkan kapasitasnya dalam menggali potensi kampung dan merumuskan prioritas pembangunan yang sinergis. Untuk itu, rekomendasi keberlanjutan dari program ini ialah membantu kesiapan warga Kelurahan Karangwaru melalui pelatihan dan pendampingan dalam mewujudkan RTJ seoptimal mungkin.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Sanata Dharma yang telah mendukung pendanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abhishek, S., Garg, S., Dewangan, M., Sahu, A., Xalxo, L., Nanda, P., Tandan, P., Quereishi, M. J., & Sahu, A. K. (2025). Community participation through women's health collectives promoted by India's National Urban Health Mission: a realist evaluation in Chhattisgarh state. *International Journal for Equity in Health*, 24(1), 132. <https://doi.org/10.1186/s12939-025-02498-z>
- Amariglio, J., Childers, J. W., Cullenberg, S. E., & (Edited). (2021). Sublime Economy on The Intersection of art and economics. In *Routledge frontiers of political economy* (Vol. 7). Routledge.
- Annunziata, A., Verrastro, G. D., Catarinella, M. A., Cuccarese, G., Corrado, S., Gatto, R. V., & Scorza, F. (2026). Climate Actions Handbook Supporting Decision Making for Regional Adaptation Strategies in Basilicata, Italy. In *Lecture Notes in Computer Science: Vol. 15895 LNCS* (pp. 304–320). https://doi.org/10.1007/978-3-031-97651-3_22
- Bappeda Kota Yogyakarta. (2025). *Pengembangan Kampung Tematik Membangun Kota dari Kampung: Kolaborasi Kampus dan Kelurahan*.
- Barsties, L. S., Ruijsbroek, A., Beenackers, M. A., Luijben, G., & van den Berg, S. W. (2025). Residents' perceptions of urban densification and health – a systems dynamics approach. *BMC Public Health*, 25(1), 1473. <https://doi.org/10.1186/s12889-025-22390-3>
- Brisdelli, A. (2026). Comparative Analysis of Participatory Urban Regeneration in Italy: From Small Towns to Metropolitan Areas. In *Lecture Notes in Computer Science: Vol. 15899 LNCS* (pp. 101–110). https://doi.org/10.1007/978-3-031-97663-6_8
- Djufry M. (2015). *Teknik Fasilitasi dan Panduan Partisipatif*.
- Fernández-Aguilar, C., Brosed-Lázaro, M., & Carmona-Derqui, D. (2023). Effectiveness of Mobility and Urban Sustainability Measures in Improving Citizen Health: A Scoping Review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(3), 2649. <https://doi.org/10.3390/ijerph20032649>
- Kompas.com. (2022, May). Profil Desa Wisata Nglanggeran . <https://Yogyakarta.Kompas.Com/Read/2022/02/01/171338378/Desa-Wisata-Nglanggeran-Profil-Rute-Menuju-Lokasi-Dan-Ragam-Wisata-Di>
- Langemeyer, J., Busse, S., Arabas, A., Benati, G., Bergier, T., Maestre-Andrés, S., & Melo, I. (2025). Social-ecological justice in cities: a spatial vulnerability

- approach. *NPJ Urban Sustainability*, 5(1). <https://doi.org/10.1038/s42949-025-00234-8>
- Loukaki, A. (2020). Urban art and the city: Creating, destroying, and reclaiming the sublime. In *Urban Art and the City: Creating, Destroying, and Reclaiming the Sublime*. Taylor and Francis. <https://doi.org/10.4324/9780367132972>
- Ma, Y., Ampong, D. K., & Mészáros, F. (2025). Access restrictions in urban logistics: a systematic review of policy effectiveness and sustainability. *Future Business Journal*, 11(259), 1–12. <https://doi.org/doi.org/10.1186/s43093-025-00675-8>
- Mardiwarsito, L., Adiwimarta, S. S., & Suratman, S. T. (1992). *Kamus Indonesia-Jawa Kuno*.
- Patricia Leavy. (2017). Research Design: Quantitative, Qualitative, Mixed Methods, Arts-Based, and Community-Based Participatory Research Approaches. In *The Guilford Press*. The Guilford Press.
- Pemerintah Kota Yogyakarta. (2021). *Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2021 Tentang Rencana Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2021 – 2041*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/200769/perwali-kota-yogyakarta-no-118-tahun-2021>
- Peterson, C., & Seligman, M. E. P. (2004). Character strengths and virtues: a handbook and classification. *Choice Reviews Online*, 42(01), 42-0624-42-0624. <https://doi.org/10.5860/CHOICE.42-0624>
- Pike, K., Nesbitt, L., Sax, D., Quinton, J., Konijnendijk, C., Day, S. D., Conway, T., & Grant, A. (2025). Pathways towards equity: Solutions-focused workshops with urban greening professionals. *Landscape and Urban Planning*, 263, 105437. <https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2025.105437>
- Schindler, M. (2025). Mosaic governance for urban verge greening: Engaging property owners and addressing socio-spatial inequities. *Cities*, 166, 106303. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2025.106303>
- Sekarsari, M., & Dwiatmoko, H. (2022). Impact of Traffic Congestion on Road Users in Tangerang City. *ASTONJADRO*, 11(3), 608–615. <https://doi.org/doi.org/10.32832/astonjadro.v11i3.7428>
- Wang, S. S. (2011). Promote the idea of the sublime order of oriental ancient capital, explore the pattern of the modern city of Xi'an - The preliminary research of the spatial order of human habitat of the era of the great Xi'an. *Journal of Xi'an University of Architecture and Technology*, 43(6), 761–767.